

Polisi, Kepolisian & HIV/AIDS di Indonesia

Iskandar P Nugraha *



Abstrak :

Diawali dengan suguhan paparan riset mengenai laki-laki yang memiliki mobilitas tinggi di Jayapura Papua, di mana responden profesi polisi termasuk yang diwawancarai. Artikel ini mencoba memperlihatkan kaitan erat antara polisi, kepolisian dan HIV/AIDS di Indonesia. Berangkat dari persoalan-persoalan mengapa masalah penanggulangan epidemi HIV harus dilakukan secara integral dan bersama-sama dengan semua pihak, bagian pertama tulisan ini akan memetakan persoalan transmisi HIV, sebagai bagian dari IMS (infeksi menular seksual) dengan segala akibatnya dalam konteks kerja polisi bila tidak tertangani. Selanjutnya dibahas mengenai hal-hal apa yang bisa dilakukan di dalam domain kepolisian. Bagian kedua akan menjelaskan suatu arah baru secara global mengenai penanganan penanggulangan HIV yang inovatif, dengan mengikutsertakan peran polisi dan kepolisian di dalamnya, bertumpu pada pengalaman penanganannya di tempat lain.

Kata kunci: Penanggulangan HIV/AIDS, IMS, Perilaku Seksual Beresiko, Polisi, Indonesia

Pendahuluan

Sebuah penelitian mengenai infeksi menular seksual (IMS) dan *Human immunodeficiency virus* (HIV) pada laki-laki dengan mobilitas tinggi di kota Jayapura Papua yang bertujuan mencari input program intervensi pencegahan memperlihatkan bahwa kelompok laki-laki yang karena pekerjaan dan lingkungannya memiliki resiko menularkan dan tertular IMS dan HIV. Terdapatnya perilaku-perilaku seksual beresiko dan tingginya inkonsistensi dalam penggunaan kondom merupakan dua penyebab utama masalah itu. Berdasar latarbelakang responden yang diwawancarai secara rahasia tersebut

terdapat mereka yang mempunyai latarbelakang profesi sebagai polisi.

Semestinya perilaku mencari pengalaman seksual atau 'jajan di luar' tidak dilakukan, apalagi di tempat asal dan terutama bagi mereka yang berkeluarga. Namun seperti yang diperlihatkan pada penelitian di atas nyatalah bahwa memiliki lebih dari satu pasangan seksual sering dilakukan baik di tempat asal maupun di tempat singgah. Idealnya mereka yang memiliki promiskuitas tinggi ini akan memproteksi diri mereka dengan penggunaan kondom secara disiplin. Gunanya agar terhindar dari transmisi IMS maupun HIV.

Survei itu memperlihatkan bahwa selain memiliki mitos dan kepercayaan yang salah mengenai perilaku seksual, kesadaran penggunaan

* Drs Iskandar P Nugraha MA Konsultan bidang komunikasi & kesehatan seksual, bekerja sebagai Provincial Technical Officer for Sexually transmitted disease & gender IHPCP-AusAID di Papua (2005-2008). Peneliti di University of New South Wales Sydney & dosen Tamu Dept of Indonesian Studies di University of Sydney Australia

kondom mereka juga masih rendah. Bila keinginan mereka untuk menggunakan kondom ada, barang tersebut seringkali tidak tersedia atau mereka tidak ingat menggunakannya karena kondisi yang tidak memungkinkan (misalnya mabuk sesudah mengkonsumsi miras atau substansi seperti narkoba atau obat kuat/jamu).

Rekomendasi penelitian tersebut yang penting adalah meminta pihak atau institusi dengan karyawan/pekerja/staf yang memiliki mobilitas tinggi untuk menyediakan informasi dan edukasi mengenai kesehatan seksual yang seluas-luasnya, seraya menyediakan perlengkapan fasilitas perawatan dan pengobatan untuk IMS dan HIV baik di tempat asal maupun yang disinggahi (*host and home communities*). Akses untuk dan penyediaan akan kondom, bentuk layanan pemeriksaan rutin/berkala adalah simpulan-simpulan kunci pada upaya penghentian perluasan transmisi IMS maupun HIV bagi kelompok laki-laki mobilitas tinggi termasuk para pelaut, sopir truk/travel maupun anggota TNI/Polri terutama yang ditugaskan di daerah perbatasan RI dan PNG (Papua Niugini).

Tampak bahwa rekomendasi penelitian itu lahir karena kuatnya perilaku seksual berisiko tidak berbanding lurus dengan luasnya jaringan seksualitas bagi terjadinya transaksi seksual.¹ Namun di atas semua itu, pembahasan mengenai polisi, kepolisian dan HIV masih jauh dari yang diperlukan.

Polisi, Kepolisian dan HIV

HIV sebagai bagian dari persoalan kita bersama diperlihatkan pada adanya data yang menyebutkan bahwa sebanyak 30 juta orang diketahui telah meninggal karena AIDS (AIDS

adalah sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh HIV). Data terakhir diketahui bahwa terdapat 5 juta orang dengan status HIV positif di seluruh Asia (termasuk Indonesia).² Epidemio HIV telah menjadi masalah serius di sejumlah tempat dan propinsi di Indonesia seperti Riau, Jakarta, Papua. Yang kita ketahui sekarang baru data yang dilaporkan sehingga merupakan ujung-ujung es epidemi dan HIV tidak lagi tantangan bagi mereka yang memiliki resiko tinggi (seperti pekerja seks, LSL dan laki-laki dengan mobilitas tinggi), tapi juga masyarakat umum termasuk ibu rumah tangga, seperti tampak pada gambaran di provinsi Papua.

Epidemi HIV di Papua yang sudah terjadi pada populasi umum (*generalized population*) merupakan hasil mengejutkan dari survei STHP tahun 2006. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penularan utama terutama sekali terjadi melalui hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang berganti-ganti pasangan. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi kelompok laki-laki diketahui lebih tinggi dari kelompok perempuan dengan perbandingan 2,9%:1,9% (BPS-Depkes, 2006:3). Secara etnisitas atau suku, jumlah laki-laki lokal Papua yang terinfeksi lebih tinggi dari laki-laki non Papua (2.8% :1.5%) (Morin, 2006).

Selama ini tidak pernah tergambar tentang Papua sebagai tempat serius untuk epidemi HIV karena 'keterpencilannya'. Namun riset tentang HIV di Papua itu telah memberikan pelajaran penting, terutama perihal kelompok laki-laki dengan mobilitas tinggi di Jayapura. Yang mengejutkan tentu saja suatu konfirmasi bahwa aparat berseragam (yang termasuk polisi di dalamnya) masuk kategori konsep 'mobile men with money' termasuk yang terekspos dengan persoalan HIV. Polisi merupakan bagian dari kelompok laki-laki dengan mobilitas

1 Maimunah Munir & Iskandar Nugroho LPPM Unair Surabaya (2011) Laporan Akhir: perilaku Seksual berisiko dan Strategi pencegahan IMS/HIV pada laki-laki dengan mobilitas Tinggi di Kota Jayapura, Jakarta, KPAN-HCPI. Laporan tersebut dapat diunduh <http://www.aidsindonesia.or.id>. Silakan mengunjungi website Komisi Penanggulangan Aids untuk informasi lengkap serba-serbi mengenai HIV/AIDS di Indonesia.

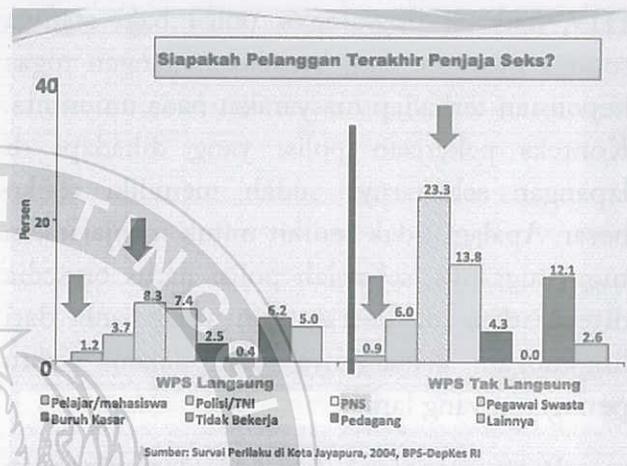
2 'Police on the beat, the missing link of HIV prevention in Southeast Asia', periksa <http://theconversation.edu.au/police-on-the-beat-the-missing-link-of-hiv-prevention-in-southeast-asia-2609>

tinggi yang juga memiliki kerentanan terinfeksi IMS dan/atau HIV terutama karena sifat dari pekerjaannya, pola mobilitas lingkungan dan usia aktif secara seksual.

Kelompok berseragam (militer dan polisi) sesungguhnya sudah lama diketahui sebagai elemen di antara kelompok populasi laki-laki yang memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi HIV/AIDS ketimbang rata-rata nasional di banyak negara. Sebuah riset dengan pendekatan KAP (*knowledge, attitude & practice*) menunjukkan bahwa prevalensi HIV di kalangan polisi yang cukup mengawatirkan tercermin dari laporan di negara-negara Afrika misalnya. Prevalensi HIV di kalangan polisi di negara tersebut sebesar 40% lebih tinggi dibanding dengan masyarakat umum. Perilaku dan respon yang kurang positif dari institusi polisi di negara-negara Afrika maupun Asia (misalnya di India dan Myanmar) ditengarai memicu tingginya prevalensi itu. Banyak persoalan yang masih dihadapi, termasuk terdapatnya konsep dan mitos salah mengenai HIV dan keengganan menggunakan kondom sebagai alat ampuh pencegahan.³

Belajar dari penelitian di negara-negara di atas, dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab mengapa polisi demikian terekspos dengan transmisi IMS dan HIV. Selain faktor umur yang aktif secara seksual yang menentukan, sikap dan budaya polisi diketahui menyumbang profil tersebut. Pendidikan dan latihan polisi diberikan pada calon-calon polisi diarahkan dengan filsafat yang bertujuan menciptakan individu-individu polisi yang akan selalu berani mengambil resiko pada pekerjaannya. Hal ini telah memberi korelasi atas kesamaan perilaku ketika berhadapan dengan kemungkinan terjadinya seksualitas beresiko. Selain itu, umumnya mereka juga memiliki uang lebih yang bisa

dibelanjakan untuk membeli seks ketiks sedang bertugas di tempat lain. Penghasilan tambahan juga dapat diperoleh karena sering terdapatnya kesempatan-kesempatan untuk melakukan 'korupsi' penyalahgunaan kewenangan tugas sebagai polisi. Rendahnya standar keselamatan kerja dan kedekatan dengan pekerja seks karena pekerjaan memberikan ekspos terhadap HIV semakin besar bagi profesi polisi ketimbang profesi lainnya.



Berdasarkan hasil survei perilaku di kota Jayapura (2004) diketahui bahwa polisi dan TNI termasuk kelompok pelanggan yang cukup menonjol sebagai klien WPS (wanita pekerja seks) di kota ini. Survei tersebut jelas suatu gambaran besar terhadap situasi bisnis seks komersial di Indonesia yang cukup besar dan meluas. Menurut Pandu Riono dalam artikel 'The current situation of HIV/AIDS Epidemic in Indonesia', sampai dengan tahun 2004 bisnis seks komersial bertumbuh dengan tajam di setiap sudut pulau-pulau di Indonesia. Terdapat dua jenis WPS yang teridentifikasi yakni yang bekerja secara langsung sebagai WPS maupun tidak langsung. Yang secara langsung adalah termasuk mereka yang berada di lokalisasi, di jalan-jalan, sementara yang tidak langsung adalah mereka yang dapat dijumpai di mall, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, bar ataupun karaoke dan terselubung. Diperkirakan

3 Graeme Hugo, Mobilitas Penduduk dan HIV/AIDS di Indonesia http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-Jakarta/documents/publication/wcms_141795.pdf

terdapat paling tidak 270 ribu WPS di Indonesia dengan jumlah pelanggan laki-laki sebesar 7-10 juta orang. Setengahnya dari mereka diketahui lebih menikah. Yang diketahui secara konsisten menggunakan kondom hanyalah sebesar 10 persen sehingga transmisi IMS dan HIV merupakan persoalan karena dapat menularkan kembali kepada pasangan tetapnya.⁴

Pendeknya, pengetahuan umum dan tema-tema besar variabel di atas mestinya rujukan dasar polisi merespon tantangan penanggulangan HIV, baik di lingkungan polisi bagi stafnya sendiri maupun yang berkenaan dengan tugas kepolisian terhadap masyarakat pada umumnya. Konteks pekerjaan polisi yang dihadapi di lapangan sebenarnya sudah memiliki resiko besar. Apalagi tidak sedikit untuk menjalankan tugas-tugasnya, sejumlah polisi harus bersedia ditempatkan di daerah lain yang jauh dari lingkungan keluarganya dan dalam waktu penugasan yang lama.

Riset mengenai laki-laki dan dinamika seksualitas mereka telah menunjukkan bahwa lingkungan profesi atau pekerjaan yang 'maskulin' (termasuk profesi polisi) berpotensi besar untuk terekspos dengan penyakit IMS dan transmisi HIV. Kecenderungan biologis laki-laki adalah memiliki pasangan seksual di luar pasangan tetapnya dan ketika mereka sedang bertugas keinginan tersebut sering secara tepat mendapat legitimasi kuatnya.

Pengalaman aktif secara seksual yang dilakukan di luar pranata hubungan tetap atau perkawinan dan dilakukan di luar lingkungan adalah juga semacam perwujudan kebebasan otonomi individual mereka. Mencari kesenangan seksual adalah bentuk kemandirian seksual yang diinterpretasikan sebagai bentuk kompensasi pekerjaan. Pengalaman seksual mereka lihat

sebagai bonus, terlebih bila dilakukan ketika melakukan perjalanan yang memberi kesempatan mengeksplorasi pengalaman baru yang berbeda. Seksualitas ini juga dilakukan anonim dan dianggap tidak terikat dengan norma-norma adat atau agama. Melakukan seks dalam perjalanan ini dianggap suatu pembenaran karena pasangan seksual tetap berada jauh, seks yang dilakukan juga cuma untuk kesenangan dan dianggap bukan ancaman bagi perkawinan dan hubungan mereka. Jajan seks sering dilakukan karena ada uang berlebih yang bisa dibelanjakan.

Pengalaman seksual diketahui semakin dianggap 'kelumrahan' bila dilakukan bersama-sama dalam kelompok, menciptakan 'bonding' dan identitas bersama di antara kelompok laki-laki dalam semangat korps yang eksklusif, tertutup dan rahasia. Pengonsumsi miras atau substansi kadang diketahui pula digunakan untuk membentuk rasa percaya diri, dilakukan secara tertutup dan rahasia meskipun terjadi di tempat-tempat legal seperti lokalisasi, bar, panti pijat maupun yang terselubung. Khusus dengan profesi polisi, posisi istimewa yang mereka miliki kadang digunakan untuk perilaku promiskuitas ini. Hak-hak istimewa yang mereka miliki bisa disalahgunakan dengan misalnya pemberian lisensi-lisensi atau ijin istimewa tak tertulis sebagai bentuk penjagaan keamanan aktivitas seks komersial terselubung bagi panti pijat, bar, karaoke dan lain-lain. Seks dan kesenangan dengan pekerja seks seringkali dipergunakan sebagai alat barter pembayaran bagi hak-hak istimewa yang diberikan.

Sayang data akurat yang dapat memetakan konteks HIV dan polisi di Indonesia belum cukup tersedia, meskipun perhatian pada perilaku seksual beresiko pada kelompok laki-laki berseragam dalam hubungannya dengan HIV sudah dimulai sejak tahun 1990-an di negara-negara maju. Selama ini data dan informasi tentang HIV di tubuh kepolisian atau militer didapat para periset bukan dari tangan

⁴ Riono, Pandu; Jazant, Saiful (2004), 'The Current Situation of the HIV/AIDS Epidemic in Indonesia', *AIDS Education and Prevention*, 16, hal 79.

pertama namun dari bahan-bahan anekdot atau berita media massa yang bisa menyesatkan. Data akurat adalah diperlukan guna menentukan kebijakan yang tepat untuk lokasi dan sasaran target sesuai dengan kondisi tiap negara.

Kita masih belum mengetahui berapa tingkat prevalensi HIV di lingkungan kepolisian di Indonesia. Padahal bila masalah HIV tertangani dengan baik, ancaman besar dalam di masa depan tidak akan terjadi. Kerugian besar akan dihadapi karena hilangnya aparat dan staf polisi tangguh yang produktif dan efektif bisa dihindari. Biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan polisi agar senantiasa mampu memberi performa prima tidaklah murah.

Selain fondasi awal penciptaan situasi kondusif yang didesain khusus sesuai dengan budaya kerja di lingkungan kepolisian lewat training atau pendidikan, program lebih terintegrasi dengan kebijakan program nasional haruslah dibentuk. Pada segi perawatan dan pengobatan, juga diperlukan suatu perencanaan dan pendokumentasian yang baik sehingga prevalensi, tes HIV dan segi-segi perawatan dapat terukur.

Suatu mekanisme penugasan polisi yang lebih beresiko rendah (misalnya dalam penentuan durasi penugasan dan rotasi jabatan polisi) merupakan contoh langkah inovasi dan tepat. Perhatian lebih besar juga harus diberikan kepada anggota kepolisian yang berada pada usia aktif secara seksual atau jenjang jabatan yang memungkinkan membeli seks ketika bertugas.

Penanggulangan HIV = penanggulangan kejahatan?

Dengan kemampuan untuk melihat persoalan HIV secara dini, secara tidak langsung kepolisian telah turut membantu upaya penanggulangan dengan cara pemutusan mata rantai transmisi penanggulangan HIV di kalangan masyarakat umum secara nasional.

Lebih jauh lagi, ini berhubungan dengan tugas polisi dalam konteks HIV yakni tugas mereka yang bisa dianalogikan dengan paradigma bantuan polisi bagi upaya-upaya penanggulangan kejahatan secara umum. Konsep tugas polisi 'melakukan pencegahan' adalah ciri tugas polisi seperti yang selama ini sudah dilaksanakan, yaitu aturan menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil atau kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor. Upaya pencegahan transmisi HIV dapat dilihat secara luas sebagai bentuk kepedulian dan peningkatan kapasitas serta kredibilitas polisi pada layanan masyarakat. Pada banyak negara polisi dan lembaga kepolisian sudah dianggap bagian dari stakeholders yang juga memiliki kepentingan dalam penentuan kebijakan nasional bagi penanggulangan HIV, bekerja bersama-sama dengan sektor swasta dan media membentuk sinergi utuh refleksi keterlibatan aktif dalam konteks pemolisian pro-aktif bagi pencegahan kejahatan.⁵

Keterbukaan Polisi dan Masalah HIV

Keterbukaan kepolisian untuk mengetahui situasi HIV dan AIDS dan upaya pencegahannya tidak saja perlu bagi kepolisian sendiri namun juga masyarakat luas pada konteks memahami situasi epidemi di suatu negara secara holistik. Pengetahuan empiris akan memberi masukan penting bagi upaya perubahan perilaku dan budaya di lingkungan polisi. Teridentifikasinya hal-hal yang tidak sesuai demi merespon tantangan akan membantu upaya memproteksi anggota korps kepolisian.

Pengetahuan seperti itu akan berguna bagi penyusunan upaya preventif yang lebih integral oleh sebab dapat meng-kover unsur kelompok berseragam/polisi yang jumlah anggotanya signifikan. Pengetahuan yang lebih

5 Periksha 'The art of medicine: HIV/AIDS and the challenges of security and conflict' *The lancet*, 375, 2, 2010.

baik akan menjadi dasar upaya bersama melihat HIV sebagai ancaman bersama dan bukan persoalan eksternal/pribadi di luar kepentingan kedinasan. Pengetahuan tentang HIV dan AIDS, termasuk pada pola-pola penularan, stigma dan diskriminasi seperti halnya terhadap penyakit lainnya akan diperlukan polisi ketika berhadapan dengan mitra dan agen-agen kesehatan umum di masyarakat.

Pembekalan mengenai resiko HIV bagi diri sendiri, kesatuannya dan dalam konteks nasional maupun global polisi saja adalah tidak cukup. Pemahaman mendalam atas pengetahuan yang baik bagi diri sendiri dan kesatuannya maupun respon aktif penanggulangan HIV dalam konteks global harus diiringi dengan pemahaman atas upaya-upaya perubahan perilaku beresiko. Artinya, pengetahuan, perilaku dan praktek seksual adalah perlu dibahas lewat pendekatan pengurangan dampak buruk/harm reduction.

Namun kita tidak hanya harus melakukan upaya pencegahan lewat perubahan-perubahan perilaku namun diperlukan juga cara-cara inovatif yang melibatkan korps kepolisian secara luas. Upaya melibatkan polisi dan kepolisian dalam upaya penanggulangan HIV merupakan area baru yang sedang berkembang dan salah satu cara pendekatan yang sedang ditempuh di negara-negara Asia Tenggara dewasa ini. Dengan bantuan Australia yang sudah terlebih dulu memberi tempat pada polisi dalam upaya pendekatan dengan kelompok-kelompok marjinal beresiko, upaya ini diharapkan membuahkan hasil dalam waktu tidak lama lagi.

Seperti yang telah banyak dilakukan di negara-negara dalam semangat pemolisian masyarakat selain Australia, polisi memiliki peran dan tugas dalam melindungi semua termasuk mereka yang masuk golongan marjinal yang rentan terhadap ancaman HIV. Lewat pendekatan pemolisian komunitas, keberpihakan polisi yang lebih besar terhadap kelompok

marjinal (misalnya pekerja seks jalanan, LSL/laki-laki seks dengan laki-laki, kelompok transjender atau pengguna narkoba suntik/IDU baik di dalam maupun di luar penjara) di banyak negara telah terbukti meningkatkan upaya preventif mengurangi penyebaran HIV.

Harus dicatat bahwa penyebaran HIV antara satu ke orang lain adalah sulit diketahui karena status HIV seseorang hanya dapat diketahui lewat tes kesehatan/pemeriksaan darah. Namun banyak orang yang enggan memeriksakan diri meskipun sadar dirinya beresiko. Sebagian dari mereka yang sadar mencari pertolongan pengobatan terhambat karena ketidaknyamanan klinik untuk kerahasiaan maupun kurangnya fasilitas yang memadai. Masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap status HIV seseorang telah membuat persoalan HIV masih tabu didiskusikan secara terbuka karena masih menyangkut aspek kerahasiaan dan sensitivitas persoalan pribadi.

Stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang HIV positif harus diakui masih amat tinggi pada lingkungan kepolisian. Pendiskriminasian atas keterusterangan seseorang dengan status positif mereka sering berakhir pada efek buruk terhadap nasib hidup dan pekerjaan mereka. Sudah banyak diketahui bahwa stigma terhadap HIV dan diskriminasi terhadap aparat polisi yang HIV positif mengakibatkan munculnya diskriminasi sosial dan hilangnya prestise bahkan ancaman terhadap pekerjaan dan promosi jabatan mereka. Penolakan keluarga masih ditambah lagi dengan hilangnya kesempatan mendapatkan promosi dan pengangkatan di tempat kerja. Di banyak negara, banyak diketahui bahwa mereka yang berada posisi seperti itu akan mengajukan pensiun dini atau diam-diam memilih mengundurkan diri ketimbang berterus-terang seraya mencari pengobatan dan perawatan untuk status HIV mereka.

Namun bahaya yang lebih besar adalah

bahwa banyak yang karena tidak memeriksakan diri dan tidak berperilaku aman ketika melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan, tetap menularkan kepada orang lain atau keluarga mereka sendiri. Sementara itu mereka yang mencari pengobatan seringkali berada pada situasi yang sudah terlambat ditangani.

Pada pihak di luaran institusi, juga harus diakui masih terdapatnya praktek-praktek polisi yang demikian keras dalam memperlakukan kelompok marjinal, seperti yang tampak pada cara mereka menangkapi dan memenjarakan mereka yang masuk pada kelompok tersebut tanpa mengindahkan semangat dan konteks pengayoman dan hak asasi mereka. Mass-media sudah sering melaporkan mengenai terjadinya insiden-insiden pembersihan yang dilakukan terhadap pekerja seks jalanan, kalangan transjender, pengguna narkoba suntik dan anak-anak jalanan tanpa adanya penanganan lebih jauh. Misalnya yang sering dilakukan oleh Satpol Pamong Praja di banyak daerah. Stigma dan diskriminasi menyebabkan mereka masih memandang perilaku kalangan marjinalitas itu sebagai bentuk kriminalitas. Agar mereka dapat dijadikan bagian dari solusi dan bukan masalah tidak lain caranya adalah dengan merangkul mereka. Seperti yang sudah dilakukan di negara-negara lain, sasaran dan target polisi haruslah diarahkan pada upaya pengedar narkoba daripada pengguna atau menargetkan mucikari daripada wanita atau laki-laki pekerja seks. Upaya yang selama ini dilakukan masih dianggap tidak menolong dalam upaya menyokong apa yang sedang dibangun pemerintah dalam memerangi HIV dengan semangat pengurangan dampak buruk/*harm reduction*.

Belajar dari pengalaman banyak negara, tindakan keras yang diterapkan terhadap mereka hanya akan mengakibatkan kian tidak terdeteksinya konsentrasi penularan HIV. Represi hanya akan mengakibatkan aktivitas mereka lakukan makin terselubung. Sebaliknya,

melakukan koordinasi akan menciptakan efek zona bebas kejahatan sekaligus menempatkan kepolisian pada peran baru sebagai pemonitor perilaku manajerial dan penekan resiko epiderni HIV.

Apa yang dilakukan selama 25 tahun terakhir di Australia pada persoalan ini misalnya, terbukti makin memberikan efektifitas bagi penanganan kesehatan masyarakat yang lebih integral, mengikutsertakan upaya penjangkauan masyarakat yang tersisih (kalangan migran, anak jalanan, pekerja seks jalanan dan seterusnya).

Simpulan

Jelaslah persoalan HIV di tubuh polisi dan kepolisian adalah suatu isu yang mengglobal. Upaya pemetaannya di dalam kepolisian sudah seharusnya mulai ditangani lebih serius sehingga ancaman HIV dan AIDS dapat diketahui secara dini dan suatu program pencegahan bisa efektif dilakukan. Diperlukan tindakan pro-aktif kepolisian yang terus menerus, ikut dalam penanganan HIV bersama-sama dengan masyarakat, mengambil tempat pada bidang yang hanya kepolisian dapat lakukan secara secara efektif.

Dengan bercermin dari pengalaman oleh negara lain, berbagai pembinaan dan hubungan baik yang tercipta di antara kepolisian dengan kelompok yang beresiko tinggi tidak saja terbukti berhasil mengatasi berkurangnya tingkat kejahatan namun juga mengurangi pola penularan dan transmisi HIV di kalangan beresiko tinggi. Pendapat bahwa hanya kelompok tertentu saja yang terekspos dengan HIV merupakan paradigma usang yang harus ditinggalkan. Semua orang dewasa ini beresiko tertular atau menularkan HIV, tidak saja lewat hubungan seksual tanpa kondom yang beresiko tinggi tapi juga misalnya terjadi lewat transfusi darah atau insiden di rumah sakit.

Bila segi perhatian HIV di dalam tubuh

kepolisian maupun tugas pengayoman kepolisian dilakukan dalam kerangka penanggulangan HIV dapat dilakukan dengan baik, maka polisi akan memberikan kontribusi yang besar dan signifikan, bahkan menjadi kepeloporan bagi ketahanan bangsa dan negara di era baru globalisasi dan teknologi. Pencapaian pada area ini jelas akan memberikan kredit positif terhadap kepolisian di atas prestasi kemampuan dalam penanganan soal terorisme misalnya. Selain aspek pendanaan, keterbukaan akses polisi jelas merupakan tantangan yang harus diperhitungkan dan bisa menjadi penghalang. Meskipun demikian, berangkat dari pengalaman tempat-tempat lainnya, kepedulian tinggi yang disertai inovasi seing akan membukakan dan memberikan jalan bagi persoalan bersama yang efektif bila dilakukan dengan kesadaran tinggi dan dengan semangat kerjasama demi terciptanya masyarakat madani yang dicita-citakan.

Daftar Pustaka

- Butt, Leslie dan Eves Richard. (eds) 2008. *Making Sense of AIDS: Culture, Sexuality and Power in Melanesia*, Honolulu: University of Hawaii Press.
- Family Health International. 2000. *Behavioral Surveillance Surveys BSS: Guidelines for Repeated Behavioral Surveys in Populations at Risk of HIV*. Arlington, VA: Family Health International.
- Graeme, Hugo, *Mobilitas Penduduk dan HIV/AIDS di Indonesia*
- http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo/Jakarta/documents/publication/wcms_141795.pdf
- <http://www.aidsindonesia.or.id>
- Hilary Pearce (2007) *The Police and HIV/AIDS: A Literature Review*.
- (ASCI Research Report No. 1 Dec 2007), http://asci.researchhub.ssrc.org/hilary-pearce/person_view
- Morin, Jack (2006). Tinjauan Terhadap Hasil STHP pada Populasi Umum di Tanah Papua. Departemen Antropologi Universitas Cendrawasih. Makalah Tidak Diterbitkan.
- Munir, Maimunah & Iskandar Nugroho (2011) High risk sexual behaviour and Strategies for the Prevention of STDs/HIV among MSM and Male Transvestite in Jayapura Papua, Abstract book, IASSCS Conference, *Journal of Culture, Health and Sexuality*, 13, 1, 2011.
- Munir Maimunah & Iskandar Nugroho (2011), High Risk Sexual Behaviour and strategies for prevention of STDs/HIV among highly mobile man in Jayapura Papua, Paper at International Seminar 'Evidence based programmes for Reproductive health and HIV interventions, IAKMI, AusAID, Denpasar
- Munir Maimunah & Iskandar Nugroho, LPPM Unair Surabaya (2011) Laporan Akhir: perilaku Seksual berisiko dan Strategi pencegahan IMS/HIV pada laki-laki dengan mobilitas Tinggi di Kota Jayapura, Jakarta, KPAN-HCPI.
- Nugroho, Iskandar (2007). *Underground and at Risk: Men who have sex with Men in Urban Papua Inside Indonesia No 94: 2007*.
- Smith, Daniel Jordan (2010). "Migration, Mens Extramarital Sex and the Risk of HIV Infection in Nigeria. Dalam *Mobility, Sexuality and AIDS*. Diedit oleh Felicity Thomas, Mary Haour- Knipe dan Peter Aggleton. Hal. 187-198. London, Routledge.
- Survei Terpadu HIV dan Perilaku di Tanah Papua (STHP) 2006.